

WALIKOTA BATAM H MUHAMMAD RUDI SAAT BERDIALOG DENGAN WARGA DI TANJUNG RIAU KECAMATAN SEKUPANG.

Wako Tinjau Pembangunan Infrastruktur Kelurahan

Muhammad Rudi meninjau proyek pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sekupang (9/4), Kecamatan Batuampar (10/4) dan Kecamatan Bengkong (16/4).

Saat peninjauan Proyek
PIK, Walikota Batam juga
berdialog dengan warga
terkait permasalahan permasalahn yang terjadi dimasyarakat. Dijelaskan Rudi
Bahwa kepemimpinan RudiAmsakar sangat komimen
dengan pembangunan infrastruktur, pelebaran jalan dan

penyelesaian banjir dan sudah dilihat hasilnya di ruas jalan bagian Timur.

Namun, untuk mengimbangi di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Batam melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

Wali Kota mengatakan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur ini telah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Dan setiap tahun dana yang dianggarkan meningkat menjadi Rp1 miliar ditahun 2017. Di tahun 2018 Pemko Batam telah menganggarkan sebesar Rp1,1 miliar selanjutnya ditahun 2018 direncanakan dianggarkan Rp1,3 miliar melalui APBD. Nilai ini menurutnya akan terus meningkat hingga akhir jabatannya sebagai Wali Kota Batam.

Dengan program PIK ini diharapkan jalan dan drainase lingkugan di seluruh kelurahan bisa selesai, karena masyarakat yang merumuskan melalui Musrenbang Kelurahan dan masyarakat juga yang mengerjakan melalui Kelompok Kerja Masyarakat (Pokjamas).

"Jadi saya berharap masalah masalah jalan dan saluran di perumahan bisa selesai dengan PIK," tegasnya. ***

> Narasi dan Foto: Humas Pemko Batam



dari



Camat Bengkong menggunting pita peresmian Jalan PIK disaksikan Walikota Batam di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.



Walikota Batam H Muhammad Rudi saat berdilog dengan warga Bengkong Harapan II Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong.



Walikota dan Wakil Walikota Batam bersama Kapolsek Batu Ampar memberikan salam Anti Hoax usai pertemuan dengan Warga Kampung Pelita Kelurahan Seraya Kecamatan Batuampar.



Camat Bengkong menggunting pita peresmian Jalan PIK disaksikan Walikota Batam di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.



Walikota Batam H Muhammad Rudi didampingi Asisten Ekonomi dan Camat Sekupang foto bersama di lokasi PIK Perum Tiban Indah Kecamatan Sekupang.



Walikota dan Wakil Walikota Batam bersama Kapolsek Batu Ampar memberikan salam Anti Hoax usai pertemuan dengan Warga Kampung Pelita Kelurahan Seraya Kecamatan Batuampar.

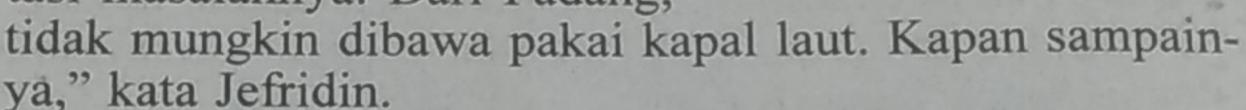


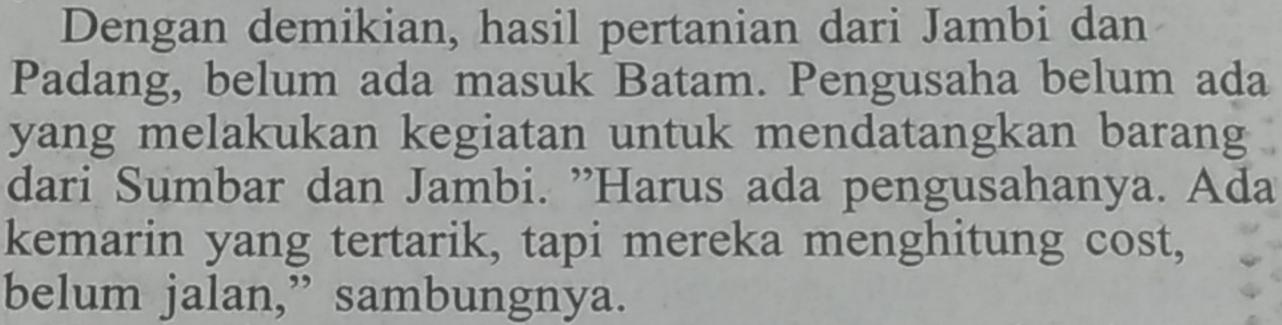
Walikota Batam didampingi Camat Sekupang meninjau jerambah Beton di Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang.

Kerjasama Batam Padang-Jambi Terkandala Transportasi

BATAM - Batam-padang-Jambi sudah ada kerjasama bahkan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Namun, kerja sama itu belum berjalan hingga saat ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin mengakui kalau kerjasama itu terkendala transportasi, dalam mendatangkan hasil produksi pertanian di Padang. Demikian dengan Jambi.

Menurut Jefridin, kerjasama belum sampai realisasi, karena kendala trasportasi. "Transportasi masalahnya. Dari Padang,





Pengusaha akan mendatangkan hasil produksi pertanian, jika bisa mendapat keuntungan. "Mereka hitung transportasi. Kalau masuk, baru dilakukan. Orang dagang kan mikir untung," ujar Jefridin.

Sementara, kendala mendatangkan hasil pertaniannya ke Batam juga diakui terkendala transportasi. Dimana, sebelumnya Jambi sudah sepakat dengan Tanjung Jabung, Jambi, untuk mengirim hasil produksi pertanian ke Batam. Namun kendala terkait transportasi. Alasannya, kapal dari Jambi menuju Natuna dulu sebelum sampai di Batam.

"Jadi lagi-lagi terkendala transportasi. Karena dari Jambi, rute ke Natuna baru Batam," bebernya. (mbb)



F-ISTIMEWA

PASAR toss 3000, Jodoh yang selama ini jadi pusat penjualan sayuran di Batam.



F-ISTIMEWA

men

pert

den

beh

tas

tid

BAHU jalan dan median jalan di Batam bakal di buat taman untuk menarik perhatian wisatawan. Suasana simpang Kabil, Batam.

Batam Perbanyak Taman

MARTUA, Batam

PEMERINTAAH Kota Batam, akan memindahkan pedagang tanaman di sepanjang jalan Simpang Jam hingga Simpang Kepri Mal. Pemindahan direncanakan, karena Pemko Batam, akan membangun taman kota disisi jalan. Sementara pedagang tanaman akan dipindahkan ke arah Bandara Hang Nadim. Nantinya, taman kota ini akan berada di antara jalur

cepat dan jalur lambat di

sepanjang jalan tersebut.

Rencana itu diungkapkan Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perkim) Kota Batam, Eryudhi Apriadi. Dikatakan, panjang jalur yang akan ditanam yakni 3 kilometer. Pembangunan dan pemeliharaan tamannya nanti akan diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai arahan Walikota.

"Pembagian per OPD-nya nanti dirapatkan. Desain dari kita. Mulai dari jenisnya apa, jarak tanamnya, Perkim yang buat. Tapi

tanamannya dan yang menanam dari OPD," kata Yudhi di Sekupang beberapa waktu lalu.

Adapun penanamannya, kata Yudhi, akan diserentakkan pada akhir April mendatang. Saat ini pihaknya sedang lakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Satuan Kerja Jalan Nasional Kementerian PUPR, dan Camat Batam Kota terkait pedagang tanaman di sepanjang jalur tersebut.

"Hitungan kami ada sekitar 24. Tapi menurut BP ada 50. Nanti mereka akan

dipindahkan, koordinasi dengan BP," ujarnya.

Koordinasi juga dilakukan dengan satker jalan nasional dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Tujuannya agar saat ada pengembangan jalan nantinya tidak mengganggu taman yang sudah dibuat oleh OPD tersebut.

Taman Kota ini diharapkan akan menjadi ikon dan daya tarik wisata Kota Batam. Apalagi pembangunan jalan layang atau flyover rencananya dilanjutkan tahun depan. Titik pembangunannya

yaitu di Simpang Kepri Mall. Setelah tahun sebelumnya flyover Simpang Jam berdiri.

Sementara Wali Kota Batam, HM Rudi, mengatakan, pedagang tanaman tetap bisa beraktivitas. Hanya saja, mereka dipindahkan dan bisa melanjutkan aktivitas di row jalan ke arah bandara Hang Nadim. "Di jalan Simpang Jam ke Simpang Kepri Mall itu akan saya bangun taman kota. Taman yang ada disitu (pedagang tanaman), pindah semua ke arah bandara," kata Rudi. ***

Dewan Minta Disdik MoU ke Sekolah Swasta

BATAM - Komisi IV DPRD
Kota Batam Batam, memanggil Dinas Pendidikan
Batam, dan mendorong
untuk melakukan MoU
dengan sekolah swasta.
Dorongan MoU dengan
sekolah swasta itu dimaksud untuk mengakomodir
calon siswa Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)
tahun 2018. Terutama dari
calon siswa dari lingkungan
sekolah.

Dorongan itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari saat RDP bersama Disdik Batam, Selasa (17/4). Sekolah swasta harus dilibatkan dalam mengakomodir siswa bina lingkungan sebagai antisipasi melonjaknya PPDB di sekolah-sekolah negeri.

"Sekolah swasta harus dilibatkan dalam mengakomodir siswa bina lingkungan," imbaunya.

Disebutkan Riky, imbauan itu wajar, karena Pemko Batam sudah memberikan bantuan kepada sekolah untuk swasta. Di antaranya, Biaya Operasional Sekolah (BOS), melalui anak didik setiap bulannya. Sehingga, pihak swasta harusnya memberikan bantuan dengan menampung siswa di lingkungannya.

"Swasta dapat dana BOS, karena rekomendasi Disdik. Jadi Disdik bisa meminta swasta menerima siswa bina lingkungan. Jika tidak, jangan direkomendasikan lagi dapat BOS," tegas Riky.

Selama ini setiap siswa SD, menerima bantuan dana BOS, sebesar Rp800 ribu per bulan. Sementara untuk SMP, dapat Rp1 juta per bulan. Sehingga saat sekolah negeri tidak mampu menampung siswa yang mendaftar karena keterbatasan ruang belajar, swasta harus membantu.

"Ini penting, untuk mengurangi kisruh penerimaan siswa nanti," imbaunva.

Sementara Ketua Komisi

IV DPRD Kota Batam Djoko Mulyono mengatakan, untuk pembahasan selanjutnya, akan dilakukan rapat dengan mengundang sekolah swasta. Sehingga komitmen sekolah swasta juga jelas diketahui DPRD. "Biar swasta juga menerima dan bersedia untuk MoU.

Jadi antara swasta dan pemerintah, benar-benar saling melengkapi," harapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Disdik Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, tahun ini dalam PPDB tahun. Sistem itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2017. Sementara tahun lalu yang digunakan sistem rayon. "Nanti, orangtua hanya bisa memilih sekolah yang terdekat dengan domisili. Jika tidak diterima, tidak bisa memilih sekolah negeri yang lainnya," tegasnya.

Dia juga mengatakan, orang tua tidak bisa memaksa anaknya harus masuk negeri. Dengan sistem zonasi, akan mengakomodir siswa bina lingkungan sebesar 90 persen. (mbb)